

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN HUMANISTIK DALAM PENYALURAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Hendi Margio

30.0886

Asdaf Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: wishendymargio1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: H. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In this study, the main problem was the ineffectiveness of the distribution of the Family Hope program, which was marked by a less humane relationship between the government and the community, which was characterized by distribution that was not on target, conflicts with the distribution team and misunderstanding of information about PKH distribution. **Purpose:** To find out how the implementation of Humanistic Government and how the impact and strategy of humanistic government in implementing the distribution of the Family Hope Program (PKH) in the Social Service of Melawi Regency. **Method:** The method used in this study is descriptive qualitative method through an inductive approach with analysis using the theory of humanistic governance put forward by Murtir Jeddawi. In addition, data collection was carried out by interviews, observation, documentation, and data triangulation and using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The Implementation of Humanistic Governance in the Distribution of the Family Hope Program (PKH) at the Melawi Regency Social Service has been going quite well, but there are still obstacles encountered in implementation such as a lack of government and community awareness in building humane relations and education people who are still low so that it affects their mindset which is still very passive. **Conclusion:** The Social Service has made efforts to organize humanistic governance in the distribution of PKH, but it has not been optimal because there are several obstacles.

Keywords: Humanistic Government, Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah kurang efektifnya penyelenggaraan penyaluran program keluarga harapan yang di tandai dengan kurang humanis hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang di tandai dengan penyaluran tidak tepat sasaran, konflik dengan tim penyalur dan kesalahpahaman informasi mengenai penyaluran PKH. **Tujuan:** Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemerintahan Humanistik serta bagaimana dampak dan strategi dari pemerintahan humanistik dalam penyelenggaraan penyaluran program keluarga harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Melawi. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan menggunakan teori pemerintahan humanistik yang di kemukakan oleh Murtir Jeddawi. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih di temui kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan seperti kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam membangun hubungan yang humanis dan pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir mereka yang masih sangat pasif. **Kesimpulan:** Dinas Sosial telah melakukan upaya penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH, namun belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala.

Kata Kunci: Pemerintahan Humanistik, Program Keluarga Harapan (PKH)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu fenomena yang sudah muncul dan melekat pada masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kesenjangan dalam pemerataan pembangunan antar daerah yang mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi penduduk, baik di daerah perkotaan maupun desa terpencil. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 256,51 ribu jiwa, atau sebesar 6,81 persen. Sementara di tahun yang sama, daerah kabupaten/kota dengan penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Melawi, dengan persentase 12,01 persen atau 25,47 ribu jiwa penduduk miskin yang terdapat di kabupaten Melawi. Maka dari itu di tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan. Yaitu melalui program pemerintah daerah yang menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang dilaksanakan melalui beberapa perangkat daerah. seperti di Dinas Sosial dengan program perlindungan dan jaminan sosial, Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial penduduk miskin melalui pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan Pemprov.

Salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Melawi terhadap masyarakat miskin adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin

terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Tercatat pemberian PKH di Kabupaten Melawi dimulai pada tahun 2013 dengan total 2.162 keluarga penerima manfaat.

Dalam pemerintah menyalurkan bantuan sosial khususnya PKH perlu sebuah pendekatan dalam penyelenggaraannya, pemerintah harus bisa menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dari kebijakan dan program yang di berikan dan di jalankan oleh pemerintah secara langsung dalam konteks penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial. Dengan menerapkan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH di Dinas Sosial Kabupaten Melawi, diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sejak PKH masuk di Kabupaten Melawi pada tahun 2013 sampai saat ini penyelenggaraan penyaluran PKH belum maksimal dikarenakan masih terjadi konflik antar penyalur PKH dengan masyarakat yang di sebabkan karena kurangnya kesadaran antara pemerintah atau tim penyalur dengan masyarakat yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih sangat pasif dan kurangnya pemahaman dan informasi yang masih membingungkan sehingga kadang menimbulkan miskomunikasi dan bisa menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak. PLH Kades Pemuar Kecamatan Belimbing Rubianto, S.STP dalam konfirmasi langsung kepada peneliti menjelaskan bahwa memang pernah terjadi konflik dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, hingga membawa senjata tajam. Ini dikarenakan ada oknum masyarakat yang berkecukupan tiba-tiba terdata sebagai penerima bantuan. sehingga banyak dari masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan hingga triwulan kedua. Alih-alih bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup, tetapi dialihkan menjadi pakan ternak. Hal tersebut menimbulkan amarah dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang mengira pemerintah akan melakukan pemerataan taraf hidup masyarakatnya. Masalah lain juga terkait akses pengambilan bantuan yang dipersulit oleh perangkat desa maupun orang yang berwenang menyalurkan bantuan, data validitas keluarga yang tidak akurat sehingga terjadi pembagian salah sasaran hingga adanya pemotongan bantuan yang tidak wajar dari perangkat desa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Raudhotul Jannah (2019) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur, menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, sosialisasi pendamping, pencairan bantuan, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen peserta. Serta kendala yang dihadapi selama pelaksana PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal pencairan dan bantuan dan verifikasi data.

Penelitian Yuliani Monika (2020) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Miskin Pada keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan PKH yang dikukur dengan menggunakan ukuran efektivitas diantaranya yaitu: pencapaian, integrasi, dan adaptasi. Hanya ukuran adaptasi yang sudah efektif. Sedangkan pencapaian dan integrasi masih belum efektif. Pada ukuran pencapaian dikatakan masih belum tercapai karena target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran dan proses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Dan pada ukuran integrasi dikatakan belum efektif karena belum adanya penyampaian mengenai keterampilan untuk anggota PKH didalam sosialisasi dengan pendamping PKH.

Penelitian Fahmi Almahdi (2019) yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas. Subyek penelitian ini sebanyak 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan pemerintah melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan PKH di Kota Malang sudah berjalan secara efektif agar bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah mencapai tujuan, perlu adanya kerjasama yang lebih baik, dan peningkatan kualitas SDM, serta perlunya partisipasi dan pengawasan oleh semua pihak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan oleh penulis berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu Teori Pemerintahan Humanistik menurut Mutir Jeddawi, dkk (2020), dimana dimensi yang digunakan meliputi Reformasi Pemerintahan, Etika dan Berkeadilan.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik dan bagaimana dampak serta strategi dari pemerintahan humanistik dalam penyelenggaraan penyaluran program keluarga harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif mampu menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan, kemudian menganalisis informasi atau data yang dikelompokkan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam suatu penelitian dengan memberikan hasil berupa gambaran lebih spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan yang terjadi dilapangan. Metode deskriptif juga

dapat didefinisikan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menyelidiki suatu kondisi dimana hasilnya akan dipaparkan dalam wujud laporan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif memiliki kecenderungan menganalisis data secara induktif yang mana penyampaian analisis akan dituangkan mulai dari yang sifatnya umum ke khusus yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang akan diteliti. Metode deskriptif dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh keterangan mengenai alasan atau sebab suatu fenomena bisa terjadi dengan cara mendalami dan mengembangkan teori sesuai dengan kejadian-kejadian yang berkaitan. Simangunsong, (2016:230) menjelaskan bahwa dengan pendekatan induktif peneliti harus dibekali dengan alat yang digunakan untuk keperluan dokumentasi seperti kamera, perekam video dan sejenisnya, hal ini dikarenakan pendekatan ini mengacu pada temuan fakta di lapangan. Dengan pendekatan ini akan didapatkan suatu teori berdasarkan pengamatan yang telah dikerjakan di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam melakukan penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*key informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Adapun Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Soegiyono, 2012:85). Informan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini merupakan orang atau pihak-pihak yang menguasai bidang terkait penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi, sebagaimana fokus penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Tim Penyuluh/Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) 2 orang. Penulis juga memilih perwakilan masyarakat sebanyak 5 orang sebagai anggota KPM PKH yang berasal dari Kecamatan Menukung yang ada di Kabupaten Melawi. Dengan menggunakan Teknik *Snowball Sampling* guna memperoleh data terkait pelaksanaan dan manfaat yang diterima dari adanya penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH di Dinas Sosial Kabupaten Melawi. Kemudian penulis mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen surat, foto wawancara maupun arsip yang ada, serta foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi dengan mengacu pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu Teori Pemerintahan Humanistik menurut Murtir Jeddawi, dkk (2020). Data dan temuan di lapangan diperoleh dari informan yang merupakan orang atau pihak yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi.

3.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Melawi

Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Melawi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah dilakukan analisis data dapat dipaparkan berdasarkan Pemerintahan Humanistik sebagai berikut.

3.1.1. Reformasi Pemerintahan

Reformasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik dapat menjadi upaya yang penting dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin atau rentan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan hidup mereka. Dalam konteks penyelenggaraan PKH, reformasi pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan sistem, tata kelola, dan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Reformasi pemerintahan dapat dilakukan dengan cara memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pentingnya reformasi pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih humanistik dalam penyelenggaraan PKH. Reformasi ini melibatkan koordinasi antarlembaga, pengembangan kapasitas pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan penekanan pada aspek kesejahteraan holistik dengan mengimplementasikan reformasi pemerintahan yang berfokus pada partisipasi masyarakat, transparansi, pemberdayaan keluarga, kolaborasi lintas sektor, dan responsivitas terhadap perubahan, penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam PKH dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan. Dengan implementasi reformasi yang tepat, diharapkan PKH dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga miskin.

3.1.1.1. Budaya Kerja Organisasi Yang Berintegritas

Dengan menerapkan budaya kerja organisasi yang berintegritas dalam penyaluran PKH, organisasi dapat membangun kepercayaan masyarakat, menjaga keadilan dan memastikan bahwa manfaat dari program ini diperoleh oleh mereka yang membutuhkan secara adil dan efektif. Dengan menerapkan budaya kerja yang berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH, organisasi penyelenggara dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas program, dan meminimalisir risiko tindakan korup dengan membangun budaya kerja organisasi yang berintegritas, melalui penekanan pada etika dan integritas, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas, pelatihan dan kesadaran akan integritas serta sanksi dan reward jelas. Dengan hal ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana PKH digunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KPM PKH.

3.1.1.2. Pelayanan Kepada Masyarakat

Kepuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan publik dapat di lihat dari keluhan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berfokus pada internal organisasi, mengembangkan kualitas pelayanan yang berorientasi keuntungan untuk negara. Tetapi juga harus berorientasi pada memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta membuat masyarakat merasa dipuaskan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanannya. Tidak hanya berhenti pada tataran puas atau tidaknya tetapi apakah pelayanan tersebut memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sebagai penerima hak menjadi warga masyarakat. Dalam pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini penyaluran PKH khususnya, koordinasi yang efektif/jelas, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan pengawasan dan evaluasi yang baik sangat penting terhadap petugas penyalur PKH dan masyarakat, dan harus dilakukan dengan kepedulian yang tinggi

terhadap kebutuhan mereka serta memahami kondisi masyarakat penerima manfaat dengan memberikan dukungan bantuan yang nyata dan tepat sesuai kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyaluran PKH dapat berjalan lebih baik, efektif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat penerima manfaat.

3.1.1.3. Akuntabilitas Pemerintah

Wujud pertanggung jawaban/ akuntabilitas dalam pendekatannya haruslah multiaspek, tidak lagi hanya berorientasi pasar misalnya pelanggan maupun publik yang membutuhkannya. Tetapi dalam pelayanan pemerintahan yang humanistik dianggap harus bertanggung jawab baik dari hukum/prosedur, komunitas, nilai-nilai maupun sosial dan norma politik. Jadi nilai-nilai dalam masyarakat ini juga menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik. Secara garis besarnya ternyata banyak yang mendapatkan dampak baik yang secara tidak langsung maupun yang secara langsung akibat dari bentuk pelayanan dan pertanggung jawaban/ akuntabilitas tersebut. Dalam rangka mencapai akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam PKH, faktor-faktor berikut perlu diperhatikan dan ditegaskan. Dengan melibatkan masyarakat, memastikan transparansi, menyediakan sistem pelaporan yang baik, serta menjalankan pengawasan dan evaluasi yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa PKH dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok yang membutuhkan.

3.1.1.4. Budaya Organisasi Yang Sehat

Dari ketiga ciri utama bagaimana pelayan publik yang humanistik tersebut di jalankan perlu didukung juga dengan yang namanya budaya kerja organisasi yang sehat yang di bentuk untuk membentuk suatu kinerja pelayanan yang humanistik. Organisasi yang sehat pada dasarnya selalu mengacu pada tingkat kemampuan organisasi untu mengatasi perubahan dan terus berfungsi dengan budaya tempat kerja yang berkinerja serta belajar dari pengalaman organisasi lain yang maju dan sehat. Budaya organisasi yang sehat adalah budaya organisasi yang berintegritas, tidak dapat disuap, tidak korupsi, berdasar bakat dan kemampuan/ prestasi serta mudah menyesuaikan atau lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara dari pada soal ideologi. Membuat kebijakan yang sesuai dengan kehendak masyarakat, yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial serta lebih memperhatikan norma etika dan moralitas.

Selain itu di dalam budaya organisasi yang sehat juga harus ada kedisiplinan seperti patuh pada peraturan, bekerja selalu datang tepat waktu, dalam ketepatan waktu juga ada kualitas output dan penggunaannya. Keramahan dan ketanggapan akan pelayanan kepada masyarakat seperti sopan santun seorang pelayan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanannya dan pemberian pelayanan yang sama kepada setiap warga masyarakat (tidak pilih kasih) serta kecepatan dan ketanggapan dalam menyelesaikan keluhan yang masyarakat sampaikan. Dan untuk Dinas Sosial di Kabupaten Melawi itu sendiri pelayanan yang di berikan baik individu maupun organisasi sudah cukup baik. Budaya organisasi yang sehat yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Melawi menurut peneliti sudah mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan mempromosikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi antara pimpinan dan bawahannya. Hal ini terlihat dari gaya komunikasi yang terbuka, kolaborasi, penghargaan, keseimbangan kerja yang menempatkan perhatian pada aspek kesejahteraan fisik, mental, dan emosional baik sesama bawahan maupun bawahan kepimpinan maupun pimpinan kepada bawahan yang ada di Dinas Sosial.

3.1.2. Etika

Di tengah akselerasi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya untuk melestarikan peradaban dan keberadaban manusia sebagai makhluk sosial yang rasional dan objektif sangatlah penting. Dengan demikian dalam menyelenggarakan pemerintahan yang humanistik prinsip-prinsip moral diperlukan sebagai harapan peran untuk menjaga agar proses pelayanan sosial tetap tertib, terutama dalam interaksi yang semakin kompleks dalam komunikasi antar individu maupun kelompok. De vos (2002:1) mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusiaan atau moral, sedangkan moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai suatu kewajiban atau norma. Moralitas untuk menentukan seseorang sampai sejauh mana memiliki dorongan untuk melaksanakan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip etika dan dan moral. Sedangkan etika lebih banyak dikaitkan dengan prinsip moral yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu atau yang biasa di kenal dengan kode etik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik tidak hanya sampai dititik etika didalam pelayanan kepada masyarakat akan tetapi masih ada dengan yang namanya Hirarki etika, Moralitas dan Kejujuran dalam sebuah pelayanan:

3.1.2.1. Hirarki Etika

Etika dalam pelayanan publik terdiri atas empat tingkatan, yaitu: etika individu, etika organisasi, etika sosial dan etika profesi. dan yang keempat atau terakhir dari hirarki etika ini adalah etika profesi yang mana merupakan serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu salah satunya adalah pegawai negeri sipil yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Etika ini sendiri terbentuk ketika seseorang menduduki posisi jabatan atau dengan kata lain terbentuk ketika saat menjadi pegawai negeri. Nilai yang biasa dilihat hari etika ini adalah benar salah atau baik buruknya terkait keprofesionalisme dalam suatu bidang pekerjaannya, nilai tersebut terkait dengan kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi yang dirumuskan melalui kode etik professional secara universal yang penegakannya melalui sanksi-sanksi profesi misalnya, pencabutan lisensi.

3.1.2.2. Moralitas

Moralitas merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang mengenai kaidah yang menentukan tingkah laku kita, kaidah tersebut menyatakan bagaimana kita harus bertindak pada situasi tertentu dan bertindak secara tepat. Moralitas seseorang dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, moralitas seseorang dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan etika, tetapi nilai moralitas seseorang mungkin saja bertentangan dengan nilai etika yang berlaku didalam lingkungannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik terkhusus dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), seorang pelayan masyarakat diharapkan mampu untuk menafsirkan situasi dan yang mana dimaksud disini ialah kemampuan individu maupun kelompok untuk memprediksi arah tindakan yang mungkin dalam suatu situasi serta memperkirakan kensekuensi-konsekuensinya. Selanjutnya diharapkan mampu untuk menentukan arah tindakan terbaik yang akan memenuhi suatu ide moral apa yang semestinya dilakukan dalam situasi yang ada baik ketika di lapangan maupun pada saat melakukan pelayanan dikantor yang secara nyata mampu menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban, formulasi rencana tindakan yang relevan dengan standar moral dalam sebuah pelayanan yang menyangkut konsep mengenai pembenaran moral ataupun aplikasi norma-norma moral sosial serta keadilan.

3.1.2.3. Kejujuran

Kejujuran adalah salah satu nilai fundamental yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik. Pemerintahan humanistik menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kejujuran menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini bantuan sosial khususnya program keluarga harapan (PKH), sangatlah sensitif dan sangat menjadi hal yang tidak tabu lagi jika pemerintah Kabupaten Melawi khususnya Dinas Sosial tidak bisa memberikan pelayanan yang memperhatikan nilai kejujuran dalam setiap penyaluran program PKH kepada masyarakat. Pemerintah harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dan selalu mempertimbangkan kepentingan publik di atas segalanya termasuk kepentingan pribadi maupun golongan atau politik. Dalam hal ini, kejujuran tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi hal yang penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan humanistik. Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik di Dinas Sosial Kabupaten Melawi.

3.1.3. Berkeadilan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH), Keadilan selalu kait mengait dengan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran dan kesalahan yang berlaku di masyarakat dalam sebuah pelayanan kepada masyarakat. Keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan tentang tiga arti keadilan. Yang pertama tidak berat sebelah atau tidak memihak, kedua berpegang pada kebenaran dan ketiga tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam memberikan bantuan kepada warga masyarakat pemerintah mengacu kepada aturan yang berlaku yang bersyarat bagi warga yang akan diberikan atau mendapatkan bantuan sosial berupa program PKH sesuai dengan segala kriterianya. Misalnya rumah tidak layak huni, penerangan yang digunakan warga belum memadai, dinding rumah yang masih rumbia atau dinding papan dan lain-lain. Dalam hal ini keadilan yang melihat latar belakang kondisi masyarakat yang mana benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, karena tidak sedikitnya juga ada kalangan oknum masyarakat yang tidak menggunakan bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Keadilan sosial memang harus pemerintah perhatikan dalam hal bantuan sosial PKH, pemerintah harus berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan miskin serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

3.1.3.1. Kebutuhan

Penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi agar tujuannya dapat tercapai dengan baik, diantaranya adalah: Keterlibatan masyarakat, Pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik. Dalam hal ini bisa dilakukan cara, seperti mengadakan pertemuan atau dialog dengan warga untuk membahas kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang akan diambil. Selanjutnya yang menjadi kebutuhan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik adalah transparan, pemerintah harus transparan dalam segala kegiatan yang dilakukan, baik dalam pengambilan kebijakan maupun penggunaan anggaran. Terkhususnya anggaran program PKH yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Melawi. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan bagi

masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi terlepas dari mereka troma dari pelayanan yang sebelumnya pernah mereka rasakan dan memberikan peluang bagi partisipasi yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanis.

3.1.3.2. Penerapannya

Dalam Penerapannya Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik di Dinas Sosial Kabupaten Melawi dapat disimpulkan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik namun masih ditemukan penghambat didalam pelaksanaannya. Penerapan yang dilakukan ketika dilapangan masih sama seperti pada umumnya yaitu dilakukan sosialisasi terhadap keluarga miskin, diberlakukannya pendampingan agar masyarakat mandiri dan sejahtera ekonominya, serta melakukan pendataan terbaru sehingga terjadi graduasi penerima PKH, setelah semuanya dilakukan maka banyak masyarakat yang keluar dari anggota KPM PKH, karena ekonominya yang sudah mapan atau di luar kriteria penerima PKH serta tidak memenuhi dalam syarat sebagai anggota KPM PKH, dan bahkan karena ada yang sudah pindah lokasi alamat tempat tinggal serta meninggal dunia. Dari situ pemuntakhiran data terbaru sangat penting untuk mengetahui kondisi terkini jumlah anggota KPM PKH. Dalam keseluruhan, penerapan penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH di Dinas Sosial Kabupaten Melawi sangat penting untuk menjamin keberhasilan program PKH tersebut terutama dalam pelayanan yang memperhatikan hubungan yang humanis dari kedua belah pihak, baik dari tim pelayan maupun dari masyarakat yang dilayani kebutuhan atau keluhan yang di sampaikan.

3.2. Dampak Dari Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi

Penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik di Dinas Sosial Kabupaten Melawi memiliki dampak yang positif terhadap program Keluarga Harapan (PKH) terutama dalam pelayanan penyelenggaraan PKH kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas program, Pemerintahan yang humanistik akan memberikan prioritas pada kesejahteraan masyarakat dan akan menempatkan program-program seperti PKH sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, pemerintah akan lebih memperhatikan kualitas program, memperkuat sumber daya manusia, dan meningkatkan efektivitas program.
2. Penyederhanaan administrasi, Pemerintahan yang humanistik juga dapat membantu menyederhanakan administrasi program PKH sehingga memudahkan akses bagi keluarga yang membutuhkan. Dengan adanya administrasi yang lebih sederhana, keluarga yang berhak mendapatkan bantuan dapat lebih mudah mengakses program PKH tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit.
3. Peningkatan aksesibilitas, Pemerintahan yang humanistik juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas program PKH kepada keluarga-keluarga yang berhak menerima bantuan. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan jangkauan program dan pelaksanaan yang lebih terstruktur.
4. Peningkatan kesejahteraan keluarga, Program PKH sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui program-program bantuan sosial. Dalam konteks pemerintahan yang humanistik, program PKH dapat diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
5. Pemberdayaan masyarakat, Selain memberikan bantuan sosial, program PKH juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan bagi keluarga miskin untuk

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan meningkatkan produktivitas. Dalam konteks pemerintahan yang humanistik, program PKH dapat diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik di Dinas Sosial Kabupaten Melawi dapat memberikan dampak yang positif terhadap program Keluarga Harapan (PKH) dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin khususnya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi.

3.3. Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi

Pemerintahan humanistik dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi dilakukan dengan beberapa strategi, di antaranya:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penyelenggaraan Pemerintahan humanistik di Dinas Sosial melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program PKH, sehingga masyarakat merasa memiliki program ini dan lebih memahami tujuannya.
2. Memberdayakan keluarga penerima manfaat. Pemerintahan Humanistik di Dinas Sosial Kabupaten Melawi juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada keluarga penerima manfaat agar mereka dapat memanfaatkan program PKH secara maksimal dan mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Dinas Sosial Kabupaten Melawi juga meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama untuk keluarga penerima manfaat PKH yang seringkali berada di wilayah yang sulit dijangkau.
4. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Dinas Sosial Kabupaten Melawi juga menjalin hubungan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan akses ke sumber daya yang dapat membantu keluarga penerima manfaat PKH.
5. Mengadopsi pendekatan berbasis hak. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik Dinas Sosial Kabupaten Melawi juga lebih memperhatikan apa yang menjadi hak warga masyarakat dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak dalam program PKH sehingga keluarga penerima manfaat tidak hanya diberikan bantuan finansial, tetapi juga mendapatkan akses ke sumber daya dan layanan yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan hak mereka.
6. Meningkatkan pengawasan dan transparansi. Penyelenggaraan pemerintahan humanistik di Dinas Sosial Kabupaten Melawi juga melakukan pengawasan transparansi dalam penyaluran Program PKH, untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyelewengan dana yang dapat merugikan keluarga penerima manfaat.
7. Meningkatkan koordinasi antar sektor. Dinas Sosial Kabupaten Melawi juga melakukan peningkatan koordinasi antar sektor terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan humanistik dalam Penyaluran program PKH, seperti koordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, sehingga program PKH dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Melawi Khususnya Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pemerintahan yang humanistik dalam menyalurkan bantuan program keluarga harapan (PKH), menerapkan

strategi-strategi tersebut, dengan harapan penyelenggaraan program PKH dapat berjalan dengan lebih humanistik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga penerima manfaat, atau bahkan semua kalangan warga masyarakat Kabupaten Melawi merasakan dampak positifnya dari terselenggaranya sistem pemerintahan yang humanistik dalam memberikan sebuah pelayanan kepada semua masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Melawi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan humanistik memberikan dampak positif dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH) seperti peningkatan kualitas program, penyederhanaan administrasi, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. penulis menemukan temuan penting yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH di Dinas Sosial Kabupaten Melawi dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberdayakan keluarga penerima manfaat, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, mengadopsi pendekatan berbasis hak, meningkatkan pengawasan dan transparansi serta meningkatkan koordinasi antar sektor. Sama halnya dengan temuan Penelitian Fahmi Almahdi (2019) bahwa pelaksanaan PKH di Kota Malang sudah berjalan secara efektif agar bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah mencapai tujuan, perlu adanya kerjasama yang lebih baik, dan peningkatan kualitas SDM, serta perlunya partisipasi dan pengawasan oleh semua pihak.

Layaknya program lainnya, penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyalura PKH juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya pemanfaatann teknologi untuk mempercepat penyaluran bantuan, dikarenakan faktor pendidikan masyarakat dan ketersediaan layanan internet, alokasi anggaran bantuan kurang tepat sasaran, serta keterlambatan informasi yang di peroleh masyarakat. Serta kendala yang dihadapi selama pelaksana PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal pencairan dan bantuan dan verifikasi data. Selanjutnya karakteristik dari penyelenggaraan pemerintahan humanistik Murtir Jeddawi, dkk (2020) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Melawi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah dalam proses pelayanannya selalu memperhatikan sikap humanisme dan kemanusiaan, yang mana dalam pelayanannya memperhatikan perikemanusiaan dan keadilan.

Dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan humanistik ini juga diharapkan secara jangka panjang melalui pendekatan humanistik dalam penyaluran PKH di Kabupaten Melawi dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat atau tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH yakni kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam membangun hubungan yang humanis dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyaluran PKH.

IV. KESIMPULAN

Dalam menyelenggrakan sistem pemerintahan berbasis pelayanan yang humanistik kepada masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Melawi melakukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya,

terutama dari sistem reformasi pemerintahan itu sendiri yang ada di Dinas Sosial baik dalam budaya kerja organisasi yang berintegritas, pelayananan yang di berikan kepada masyarakat, akuntabelitas pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Melawi dan budaya organisasi yang sehat. Kedua dalam penyelenggaraannya juga harus lebih memperhatikan dengan yang namanya etika supaya terciptanya hubungan yang humanis dari pemerintah dan masyarakat yang sebagai pelayan dan yang di layani. Dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian juga adalah hirarki etika itu sendiri, moralitas dan kejujuran. Dan yang terakhir adalah Berkeadilan yang mana dari segi kebutuhan dan penerapannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang humanistik keadilan sosial yang menjadi harapan dan tujuan akhir dari terselenggaranya sistem pelayanan pemerintahan yang humanistik.

Dampak dari pemerintahan yang humanistik ini adalah peningkatan kualitas program, penyederhanaan administrasi, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, penyelenggaraan pemerintahan humanistik ini melalui pendekatan humanistik dalam penyaluran PKH di Kabupaten Melawi dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dengan strategi yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat, memberdayakan keluarga penerima manfaat, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non pemerintah, mengadopsi pendekatan berbasis hak, dan meningkatkan pengawasan dan transparansi serta meningkatkan koordinasi antar sektor. Penting untuk memperhatikan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang humanistik dalam penyaluran program PKH di Dinas Sosial Kabupaten Melawi, memastikan apakah benar bahwa program yang di canangkan untuk masyarakat ini berkelanjutan atau malah sebaliknya. Namun, implementasi dan evaluasi program juga harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa program benar-benar berdampak positif dan memberikan manfaat bagi keluarga yang membutuhkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta ada beberapa lokasi yang belum dapat dijangkau peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi beserta jajarannya dan seluruh pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Melawi yang telah berkenan memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Almahdi F. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang*. 2019;

Avriyanti. *Dampak Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*.

Jannah R. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur*. 2019;

Jeddawi M, Riani, Arwanto B. 2020. *Pemerintahan Humanistik*. Bandung: Cendekia Press;

Simangunsong, Fernandess. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Yuliani M. *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo*. 2020;

